

RELEVANSI IDE THE OPEN SOCIETY KARL POPPER DAN MULTIKULTURALISME DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Azril Azifambayunasti*

*azrilazfaaa@gmail.com

a Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta,57125, Indonesia

Article history:

Received 30 October 2021; Revised 23 June 2022; Accepted 24 June 2022; Published 30 June 2022

Abstract: *The Open Society by Karl Popper is an idea that opposes any kind of oppression and totalitarianism, so that what is called an open society will be realized, a society that prioritizes freedom but remains in the corridor of law and ethics. The Open Society is an idea that opposes socialism and capitalism at the same time. As an important idea in the modern age, The Open Society Popper must be able to use in life, just like knowledge that has an axiological basis. This idea is also closely related to democracy which up-holds individual freedom while still being controlled by law. On the one hand, The Open Society can be implemented in the education democracy movement, which is then called multicultural education, with kind of values that accommodate the freedom and equality of individual rights in society. The purpose of this study is to discuss the idea of The Open Society and its relevance to historical education, especially regarding multiculturalism. This discussion was reviewed using the literature study method. The results of this analysis show that The Open Society Popper can be used as a basis for multicultural education because it gives high respect to individual freedom and opposes domination by certain groups, while still respecting the law.*

Keywords: *Open Society, Karl Popper, History Learning.*

Abstrak: *Open Society* menurut Karl Popper adalah sebuah gagasan yang menentang segala bentuk penindasan dan totalitarisme, sehingga akan terwujud apa yang disebut masyarakat terbuka, masyarakat yang mengutamakan kebebasan namun tetap dalam koridor hukum dan etika. Masyarakat Terbuka adalah sebuah ide yang menentang sosialisme dan kapitalisme pada saat yang bersamaan. Sebagai sebuah ide penting di era modern, *The Open Society* Popper harus dapat digunakan dalam kehidupan, seperti halnya pengetahuan yang memiliki landasan aksiologis. Gagasan ini juga erat kaitannya dengan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dengan tetap dikendalikan oleh hukum. Di satu sisi, Masyarakat Terbuka dapat diimplementasikan dalam gerakan demokrasi pendidikan, yang kemudian disebut pendidikan multikultural, dengan nilai-nilai yang mengakomodasi kebebasan dan persamaan hak individu dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai gagasan *The Open Society* dan relevansinya dengan pendidikan sejarah, khususnya perihal multikulturalisme. Pembahasan ini dikaji menggunakan metode studi pustaka. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *The Open Society Popper* dapat dimanfaatkan sebagai landasan pendidikan multikultural karena memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan individu dan menentang penguasaan oleh kelompok tertentu, dengan tetap hormat pada hukum.

Kata kunci: Masyarakat Terbuka, Karl Popper, Pembelajaran Sejarah.

PENDAHULUAN

Suatu ide atau gagasan, pada umumnya mempunyai dasar atau landasan. Menurut Jujun Suriasumantri, segala pengetahuan pasti memiliki tiga landasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam hal ini, landasan ontologis berkaitan dengan objek yang dikaji. Kemudian, landasan epistemologis berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dari pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, sebuah gagasan yang juga dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan, tentu memiliki objek kajian tertentu, lahir dari serangkaian proses ilmiah, dan yang terpenting adalah mempunyai manfaat bagi aspek-aspek tertentu (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2016).

Berdasarkan landasan pengetahuan tersebut, diketahui bahwa suatu gagasan harus mempunyai nilai guna atau manfaat. Dalam kajian ini, salah satu gagasan yang dibahas adalah *The Open Society* yang dicetuskan oleh Karl Raimund Popper. Suatu gagasan tentang masyarakat terbuka yang muncul dari bukunya dengan judul *The Open Society and Its Enemies*, yang disebutkan sebagai buku paling berpengaruh di New Zealand (Kierstead, 2019). *The Open Society* yang dicetuskan Popper tersebut merupakan sebuah pembelaan terhadap kebebasan, menentang ide totalitarian dan otoritarian, historisisme serta takhayul (Eidlin, 2013). Gagasan tersebut, sebagai sebuah pengetahuan, sudah barang tentu memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

Salah satu manfaat gagasan *The Open Society Popper* dapat dilihat dalam implementasinya pada pembelajaran sejarah. *The Open Society* yang menentang totalitarianisme dan menghendaki terwujudnya kebebasan, berkaitan erat dengan demokrasi. Demokrasi dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kaitannya dengan sistem ketatanegaraan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Demokrasi dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam pendidikan multikultural, dan salah satu cara implementasi nilai multikultural tersebut adalah melalui pendidikan sejarah. Seperti yang kita tahu, pendidikan sejarah memegang peran penting dalam pembentukan nasionalisme dan yang dibangun di atas keragaman. Namun, menurut Santosa (2017), pembelajaran sejarah sebagai implementasi dari pendidikan sejarah, hingga saat ini masih mendapat stigma sebagai pembelajaran yang didominasi hafalan, tidak mengembangkan sifat berpikir kritis, dan jauh dari realita kehidupan. Selain itu, dominasi sejarah nasional dalam materi standar pembelajaran sejarah juga kurang mengakomodasi penyampaian sejarah lokal. Padahal, pembelajaran sejarah seharusnya menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan perbedaan masa lalu antar wilayah, etnis, maupun budaya di Indonesia serta memaknainya sebagai sebuah keberagaman yang menjadi fondasi kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas mengenai gagasan *The Open Society* dan relevansinya dengan pendidikan sejarah, khususnya perihal multikulturalisme.

METODE

Pembahasan ini dikaji menggunakan metode studi pustaka. Metode tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Zed (2004), metode studi pustaka mempunyai empat ciri, antara lain: (1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; (2) data pustaka bersifat siap pakai; (3) data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder; dan (4)

kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam pembahasan ini, pustaka yang digunakan adalah buku dan artikel jurnal yang terkait dengan ide atau gagasan *The Open Society Karl Popper*. Selain itu, disertakan pula referensi yang mengkaji penanaman nilai multikultural dalam pembelajaran sejarah. Setelah mengumpulkan pustaka sesuai dengan kebutuhan tema, penulis kemudian membaca dan menuliskan pernyataan-pernyataan yang dianggap dapat membangun narasi sesuai dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Gagasan *The Open Society*

Karl Raimund Popper lahir dari keluarga Yahudi pada 28 Juli 1902 di Himmelhof, Vienna, Austria. Ia tumbuh dalam atmosfer keluarga yang *decidedly bookish*, dekat dengan buku-buku dan orang tua yang begitu mendukung bakat intelejensinya. Masa muda Popper tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial lingkungannya, seperti peristiwa Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria (Corvi, 2005). Peristiwa tersebut membawa dampak besar bagi perekonomian, juga menimbulkan pertentangan antar kelas yang membawa Popper pada titik balik pandangan politiknya.

Pada tahun 1928, Popper memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dari University of Vienna (Kierstead, 2019). Sebelumnya, pada tahun 1919, Popper telah terlibat dalam Asosiasi Sosialis, bahkan melabeli dirinya sebagai seorang komunis. Namun, konflik antara para demonstran dan polisi terjadi di Horlgasse membuatnya berpikir ulang tentang Marxisme yang seolah menghalalkan pertumpahan darah demi kepentingan revolusinya melawan ide kapitalis. Setelah itu, ia memandang sosialisme negara sebagai suatu opresi yang tidak akan menemukan titik temu dengan ide kebebasan. Ia juga berpendapat bahwa kebebasan lebih penting daripada persamaan, karena persamaan sejatinya tidak akan pernah terwujud tanpa kebebasan itu sendiri (Corvi, 2005). Dari situ, Popper mulai terlihat menentang segala bentuk penindasan dan tidak lagi setuju dengan sosialisme yang ia anggap akan selalu lekat dengan konflik demi mewujudkan keberadaan masyarakat tanpa kelas.

Kekecewaan Popper terhadap ide sosialis-komunis bukan merupakan satu-satunya alasan untuknya menentang opresi dan totalitarianisme. Menurut Corvi (2005), Popper awalnya lebih tertarik pada matematika, fisika, dan ilmu filsafat. Ia bahkan sukses menerbitkan buku pertamanya, *The Logic of Scientific Discovery* (Kierstead, 2019) dan menyangkal positivisme yang kala itu berkembang di Vienna Circle (Gorton, 2006). Tidak hanya itu, Popper juga mengkritik ide-ide politik Plato, Hobbes, dan Machiavelli yang cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dan menceminkan politik penuh dengan retorika (Eidlin, 2013). Kritiknya terhadap ide para filsuf besar tersebut juga menggambarkan bagaimana Popper dengan konsisten menentang pemikiran-pemikiran yang mengandung ide totalitarian. Hal itu pula yang menjadi cikal bakal bentuk gagasannya terkait masyarakat terbuka.

Pada sekitar tahun 1935, berbagai negara di Benua Eropa, termasuk juga Austria, berada di bawah rezim-rezim totaliter. Austria kala itu didominasi oleh pengaruh Hitler dan mempunyai banyak simpatisan Nazi. Mayoritas anggota Vienna Circle mulai berpindah ke Inggris dan Amerika Serikat, bahkan salah satu tokohnya terbunuh oleh seorang Nazi pada tahun 1936. Popper, sebagai salah satu di antara sekian banyak keturunan Yahudi di wilayah Austria kemudian mencoba menyelamatkan diri serta keluarganya dengan pindah mengajar ke University of Canterbury di New Zealand (Corvi, 2005).

Dalam pelariannya di New Zealand itu lah Popper kemudian berhasil menuntaskan dua buku yang berkaitan dengan ilmu sosial dan politik. *The Open Society and Its Enemies* yang terdiri dari dua jilid dan *The*

Poverty of Historicism yang mengkritisi historisisme, suatu ide yang dianggapnya menginspirasi ide marxis dan fasis (Corvi, 2005). Popper telah menjadikan *The Open Society and Its Enemies* sebagai sebuah karya fenomenal. Buku yang mengkritisi pemikiran Plato, Hegel, dan Marx tersebut bahkan juga disebut sebagai karya paling berpengaruh di New Zealand (Kierstead, 2019), meski Popper sendiri sempat mengatakan bahwa negeri itu adalah tempat paling jauh di dunia karena kala itu, New Zealand tidak memiliki kontak apapun dengan dunia, kecuali dengan Inggris.

The Open Society and Its Enemies awalnya masih berkaitan dengan historisisme. Namun, seiring berjalannya waktu, gagasan tentang masyarakat terbuka dalam buku tersebut kemudian menjadi satu dimensi tersendiri (Corvi, 2005). *The Open Society and Its Enemies* mencoba untuk menjelaskan bagaimana peradaban dikhianati oleh para pemimpin dan membentuk suatu masyarakat tribal atau *closed society*. Suatu realitas yang menjadi penghalang bagi terwujudnya peradaban yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan. Popper juga memandang bahwa musuh dalam gagasannya terkait masyarakat terbuka ini adalah kecenderungan manusia untuk hidup dalam masyarakat tribal atau tertutup. Oleh karena itu, ia kemudian menawarkan gagasan *open society* atau masyarakat terbuka yang rasional dan kritis (Gaus, 2017).

Popper mungkin tidak akan melahirkan karya-karyanya tentang filsafat politik jika sistem perpolitikan Eropa tidak didominasi oleh totalitarian Nazi dan komunis, mengingat studi awalnya lebih terpusat pada teori pengetahuan dan ilmu fisika. Puncaknya adalah ketika Austria berada di bawah kendali Hitler sampai berakhirnya Perang Dunia II, Popper kemudian menulis *The Open Society and Its Enemies* dan menyebutnya sebagai “*his war effort*” (Eidlin, 2013). Buku tersebut resmi diterbitkan beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, dan Popper pindah ke London School of Economics, Inggris (Niiniluoto, n.d.).

The Open Society Popper dan Musuh-Musuhnya

The Open Society, sebagai sebuah gagasan yang muncul pasca Perang Dunia II, mencoba mengampanyekan kebebasan dan kesetaraan individu serta menentang keras berbagai bentuk opresi yang sebelumnya langgeng di hampir seluruh belahan dunia. Popper membangun kerangka teori tentang masyarakat terbuka berdasarkan suatu dikotomi antara *the closed society*, masyarakat tribal atau kesukuan yang magis dan kolektif, dengan *the open society*, masyarakat terbuka yang mengakui dan menghargai *personal decision* atau keputusan individu (Jordaan, 2017). Dalam bukunya, Popper memaparkan dan menganalisis bagaimana totalitarianisme bekerja serta mencoba mencari jalan tengah di antara perseteruan pasar bebas liberalisme dan ideologi sosialis-komunis (Hathaway, 2019). Jalan itu adalah gagasan tentang *The Open Society* yang kemudian juga diidentikkan dengan demokrasi.

Buku *The Open Society and Its Enemies* yang ditulis Popper selama pelariannya di New Zealand terbit dalam dua jilid. Jilid pertama yaitu *The Open Society and Its Enemies: The Spell of Plato*, dan jilid kedua yaitu *The High Tide of Prophecy: Marx, Hegel, and The Aftermath*. Meski inti utama dari gagasan tersebut adalah kritik terhadap totalitarianisme dan ide dari para pemikir modern seperti Hegel dan Marx, perlu diketahui bahwa gagasan Popper tentang masyarakat terbuka ini juga berkaitan dengan historisisme, sebuah pandangan yang menganggap bahwa sejarah akan bergerak dan berakhir pada satu titik yang terprediksi, telah menjadikan para penganutnya melahirkan sistem tirani (Gorton, n.d.). Hal itu tercermin pada realita tentang bagaimana Nazi menjalankan kekuasaannya, juga pemerintahan sosialis-komunis yang terkesan menghalalkan pertentangan dan konflik demi cita-cita akhir mereka, yakni masyarakat tanpa kelas. Menurut Popper, ide Marxis tersebut berdasar pada *prophecy* atau kenubuatan, bahwa suatu saat akan

tercipta masyarakat tanpa kelas, sehingga pengikutnya memaksakan hal tersebut untuk terwujud bagaimana pun cara dan jalannya (Popper, 1963). Oleh karena itu, Popper memandang historisisme sebagai akar dari opresi, penyangkalan terhadap hak dan kebebasan individu.

Dalam buku jilid pertamanya, *The Spell of Plato*, Popper mulai fokus membahas totalitarisme berdasarkan filsafat politik Plato. Pada awal pembahasannya, Popper bahkan secara jelas menyoroti gagasan Plato yang menyatakan bahwa setiap individu harus mempunyai pemimpin, tidak boleh dibiasakan untuk berpikir dan bertindak atas inisiatif sendiri baik di situasi perang maupun damai, harus senantiasa setia mengikuti pemimpinnya, bahkan dalam melakukan hal terkecil sekalipun, harus tetap berdasar pada perintah (Popper, 1966). Pada intinya, Plato menghendaki setiap individu hidup dan bertindak di bawah kepemimpinan, dalam arti lain harus ada seorang pemimpin yang mengorganisasi dan menjalankan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, sangat terlihat alasan mengapa Popper begitu keras mengkritik filsafat politik Plato.

Popper, di sisi lain juga memaparkan konteks sosial yang melatarbelakangi pemikiran Plato. Perang dan instabilitas politik yang meletus setelah pemerintahan demokratis diterapkan di Athena, membuat Plato menyetujui keberadaan masyarakat yang rigid dengan hierarki kelas tertentu, tradisional, kesukuan, dan otoriter. Suatu masyarakat yang disebut Popper sebagai *closed society* (Popper, 1966). Popper bahkan menyebut Plato sebagai filosof yang meletakkan dasar totalitarisme, mengubur individualisme dan egalitarianisme yang sempat muncul dalam demokrasi Athena, serta membangun sistem hierarkis yang mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat daripada hak dan kebebasan individu (Gorton, n.d.).

Lebih lanjut, Popper juga mengulas *Republic*, karya Plato yang mengkritik demokrasi karena melahirkan oligarki dan perseteruan kelas dalam masyarakat. Namun, Plato tidak memberikan jalan keluar berupa gagasan tentang masyarakat tanpa kelas yang setara, melainkan tetap mengacu pada sistem pemerintahan Sparta, *best state* versi Plato dengan sistem pembagian kelas masyarakatnya yang sangat rigid. Dalam pemerintahan Sparta, hanya kelas penguasa yang memiliki hak politik dan pendidikan serta diperbolehkan untuk angkat senjata, sehingga tidak akan ada tantangan pada otoritas yang mereka miliki, dan tidak ada perseteruan antar kelas masyarakat seperti yang terjadi pada demokrasi Athena (Popper, 1966). Jadi, dalam hal ini, Popper menyanggah pemikiran Plato yang mendukung rigidnya kelas sosial ala Sparta untuk mengatasi perseteruan antar kelas yang disebabkan karena ketidakjelasan batas peran dan tugas masing-masing kelas. Sistem yang semacam itu mungkin dapat menciptakan stabilitas politik, tetapi menurut Popper, hal tersebut tetap akan melahirkan ide totalitarian yang dapat menghambat perkembangan banyak aspek dalam masyarakat.

Dalam pandangan Popper, Sparta yang disebut Plato sebagai *best state* itu tidak lain adalah suatu masyarakat yang tertutup, *closed society*. Suatu masyarakat yang mempunyai kontrol total terhadap warga negaranya serta mengutamakan kebutuhan kolektif daripada individu. Melalui *Republic*, Plato membedakan tiga tingkatan kelas sosial dalam *best state* versinya, yaitu *the guardians* atau penjaga, *warriors* atau prajurit, dan *working class* atau kelas pekerja. Namun, pada umumnya kelas sosial menurut Plato tersebut lebih dikenal dalam dua jenis, yaitu penguasa yang terpelajar dan memiliki kemampuan militer serta *human sheep*, kelas pekerja yang tidak terdidik dan tidak punya keahlian perang. Sementara itu, yang disebut *guardian* pada umumnya adalah para prajurit yang sudah berpengalaman, bijaksana, dan dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Plato hanya tertarik pada para penguasa, karena baginya, para pekerja adalah pihak yang memang berfungsi menyuplai segala kebutuhan kelas

penguasa. Namun, ia menolak penyebutan kelas pekerja sebagai budak. Ia lebih menghendaki mereka disebut sebagai pekerja atau pembantu. Oleh karena itu, Popper juga menyebut bahwa sistem pemerintahan Sparta yang didukung oleh Plato tersebut menginspirasi lahirnya Nazi dan berbagai pemerintahan totaliter lainnya di era modern (Popper, 1966).

Kelas sosial yang dipaparkan Plato dalam *Republic* begitu rigid dan absolut, bahkan ia juga menyebutnya sebagai sebuah takdir yang tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Posisi kelas yang satu tidak dapat menggantikan posisi kelas lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan filsafat esensialisme Plato yang juga disinggung Popper dalam bukunya. Tidak hanya mengkritik gagasan Plato tentang *closed society* dengan Sparta sebagai acuannya, Popper juga mengkritik esensialisme dan holisme di samping historisisme yang telah dijelaskan di awal. Esensialisme Plato memandang setiap entitas di dunia memiliki bentuk yang ideal dan abadi, tapi kemudian terdefinisi secara beragam sehingga memunculkan banyak copies atau tiruan, yang mana tiruan tersebut suatu saat akan sampai pada kehancurannya. Plato mencontohkan negara-negara yang ada kala itu sebagai *copies* atas bentuk negara yang ideal, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan sampai pada kehancurannya (*law of decay*), berawal dari sistem timokrasi, oligarki, demokrasi, dan berakhir pada kediktatoran. Oleh karena itu, Plato menawarkan masyarakat yang hierarkis dan rigid dengan pemimpin bijaksana sehingga dapat mencegah kerusakan yang ia gambarkan (Gorton, n.d.).

Holisme di sisi lain juga merupakan ide yang mempengaruhi gagasan totalitarian Plato. Holisme memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh, dan kepentingan bersama selalu lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam bukunya, Popper memaparkan bagaimana Plato mengatakan bahwa suatu polis lebih utama daripada individu yang hidup di dalamnya. Plato juga menyebutkan bahwa hanya keseluruhan yang stabil dan kolektivitas yang permanen yang memiliki realitas, bukan individu yang hanya melintas. Oleh karenanya, sudah menjadi hukum alam bahwa individu harus tunduk pada keseluruhan tersebut (Popper, 1966). Popper menyanggah gagasan Plato tentang negara dalam *Republic*-nya, historisisme, esensialisme, dan holisme yang menurutnya menjadi akar dari totalitarianisme. Gagasan itu lah yang membentuk sebuah *closed society* dimana di dalamnya terdapat kolektivisme serta pengendalian terpusat yang diperkuat melalui propaganda dan kebohongan, sebuah perwujudan yang sempurna dari ide totalitarian.

Ide totalitarian yang menurut Popper lahir dari filsafat politik Plato menjadi alasan besar untuknya mencetuskan gagasan *the open society*. Sebuah gagasan tentang masyarakat terbuka yang mengutamakan hak-hak individu dan kebebasan, humanisme, rasionalisme, serta demokrasi. Menurut Popper, kebebasan dan penghargaan atas hak-hak individu adalah jalan utama untuk mencapai sebuah kesetaraan. Setiap perbedaan di antara individu harus dihargai dan mendapatkan tempat yang sama, sehingga kesetaraan baginya adalah ketika masing-masing dari individu tersebut dihargai kebebasannya. Dalam *The Open Society and Its Enemies* jilid pertama, *The Spell of Plato*, Popper dengan jelas menempatkan gagasan-gagasan Plato yang mengandung nilai totalitarianisme sebagai musuh utama masyarakat terbuka yang telah muncul sejak zaman kuno. Selanjutnya, pada jilid kedua, *The High Tide of Prophecy: Marx, Hegel, and The Aftermath*, Popper kembali memaparkan musuh-musuh dari masyarakat terbuka yang di antaranya yaitu gagasan para pemikir modern seperti Hegel dan Marx. Gagasan-gagasan yang menurut Popper merupakan produk dari esensialisme Aristoteles, yang tidak lain adalah murid Plato (Gorton, n.d.).

Dalam buku jilid kedua, Popper memandang bahwa gagasan Hegel dan Marx yang terinspirasi dari Aristoteles merupakan akar dari totalitarianisme modern. Namun, Popper lebih menyoroti pada bagaimana pemikiran keduanya dipengaruhi oleh esensialisme dan historisisme yang kemudian menjadi acuan rezim-rezim totaliter di abad ke-20. Sejalan dengan filsafat politik Plato, Aristoteles memandang feodalisme sebagai sistem dalam *best state* versinya. Ia juga mengamini esensialisme dan historisisme yang memandang segala hal, termasuk perjalanan sejarah akan berakhir pada satu titik yang baik dalam versinya (Popper, 1966). Memasuki era modern, historisisme kemudian tercermin dalam pemikiran Hegel, dimana ia percaya bahwa sejarah manusia digerakkan oleh suatu dialektika. Maksud dari dialektika di sini adalah proses mulai dari munculnya suatu ide (*thesis*) yang akan disusul oleh kemunculan antithesis (ide yang menentang thesis), dan kemudian menuju pada perubahan yang menghasilkan sintithesis (hasil rekonsiliasi thesis dan antithesis) (Gorton, n.d.). Pandangan tersebut, menurut Popper, menggambarkan bahwa perjalanan sejarah umat manusia selalu diisi dengan pertentangan antara berbagai thesis dan antithesis.

Historisisme semacam itu juga tercermin pada ide Karl Marx. Meski gagasan Marx disebut kebalikan dari dialektika Hegel, tetapi keduanya sama-sama menganut historisisme. Menurut Marx, sejarah adalah proses suksesi sistem ekonomi dan politik. Perkembangan teknologi akan mendorong munculnya mode produksi baru guna memenuhi kebutuhan manusia, dan setiap kemunculannya akan diiringi pula dengan munculnya sistem politik, hukum, nilai, bahkan praktik moral dan agama yang sesuai dengan kepentingan tersebut. Marx percaya bahwa mode produksi baru itu adalah mode kapitalis yang seiring berjalannya waktu akan menimbulkan inefisiensi, instabilitas, dan ketidakadilan. Hal tersebut akan mendorong terjadinya revolusi dengan tujuan membentuk masyarakat komunis yang menurut Marx dapat memberikan kesetaraan (Gorton, n.d.). Dalam buku jilid keduanya, Popper juga menyinggung gagasan Marx yang menyatakan bahwa sejarah masyarakat sejak dulu hingga kini adalah sejarah tentang perjuangan kelas antara pemilik modal (*borjuis*) dan buruh (*proletariat*). Gagasan tersebut mengindikasikan bahwa nasib manusia ditentukan oleh perang antar kelas, bukan perang antar negara sebagaimana biasa disebut para sejarawan lainnya (Popper, 1966). Dari situ, jelas bahwa gagasan Marx meyakini bahwa pola sejarah adalah perang antar kelas demi mencapai titik akhir yaitu terwujudnya masyarakat komunis.

Gagasan Hegel dan Marx yang meyakini bahwa sejarah akan berakhir pada suatu titik sesuai versinya masing-masing itu, menurut Popper merupakan sebuah gagasan yang begitu utopis. Individu, menurut Popper adalah penggerak sejarah dan reaksi dari individu dari masa ke masa tidak akan bisa diprediksi secara pasti, apalagi ditentukan. Dengan demikian, Popper menganggap gagasan Hegel dan Marx tersebut secara terang-terangan mengingkari kontribusi, tanggungjawab, dan kebebasan individu dalam gerak evolusi sejarah. Popper kemudian menempatkan gagasan-gagasan yang disebutkan terlalu berambisi menentukan arah dan akhir dari gerak evolusi sejarah itu sebagai musuh utama masyarakat terbuka. Pengharganya terhadap kebebasan individu tersebut membuatnya menolak keras anggapan bahwa individu dapat dengan mudah dikendalikan oleh sebuah ritme, dan setiap usaha pengendalian individu adalah cermin dari totalitarianisme (Yuliantoro, 2017). Gagasan semacam itu, celakanya, telah diterapkan oleh Nazi dan berbagai rezim komunis yang pernah menguasai negara-negara di dunia pada era modern.

Totalitarianisme dan historisisme yang tercermin dalam gagasan Plato serta Hegel dan Marx menjadi hal utama yang disorot Popper sebagai musuh dari masyarakat terbuka. Gagasan tentang

masyarakat terbuka yang ditulis Popper dalam bukunya begitu menjunjung tinggi humanisme dan kebebasan individu, sehingga gagasan-gagasan lain yang dengan jelas mengingkari hak dan peran individu ditolak olehnya. Pembelaan atas kebebasan, pengakuan atas perbedaan, jaminan akan hak-hak dasar setiap individu, kepedulian terhadap sesama, dan masyarakat yang rasional merupakan inti dari gagasan *The Open Society* yang diusung Popper sebagai kontra atas masyarakat tertutup yang kolektif dan totaliter, yang kenyataannya justru langgeng dalam sejarah dunia sejak zaman kuno hingga modern.

Popper mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang menghargai kebebasan individu dan hidup untuk bahaya-bahaya yang melekat dalam segala bentuk kekuasaan dan otoritas. Berdasar pernyataannya tersebut, Popper juga diidentikkan sebagai liberalis, tetapi ia dengan tegas menolak *the unrestrained capitalism* atau kapitalisme yang tidak terkendali. Meski menjunjung tinggi kebebasan, Popper masih sangat menekankan prinsip hukum dan etis, sehingga ia lebih cenderung mendukung ekonomi pasar karena persaingan yang lebih sehat dan minim manipulasi serta berada dalam pengawasan hukum, karena menurutnya, kebebasan yang tidak terkendali akan menyebabkan yang kuat menindas yang lemah, sehingga dalam hal ini diperlukan peran negara untuk melindungi hak setiap individu (Niiniluoto, n.d.). Dengan demikian, kebebasan individu yang diusung Popper dalam *The Open Society* bukanlah kebebasan dalam berbagai bidang yang tidak mengenal batas dan kendali, melainkan tetap berada dalam koridor hukum dan etis, sehingga dari situ lah keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya akan didapatkan.

The Open Society Popper kemudian juga diidentikkan dengan demokrasi karena penghargannya terhadap hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, gagasan Popper dapat dikaitkan dengan kajian multikulturalisme dalam bidang pendidikan. Salah satu jalan mengimplementasikan multikulturalisme dalam pendidikan adalah melalui pendidikan sejarah. Dalam pembahasan selanjutnya, akan dibahas bagaimana pendidikan sejarah dapat menjadi sarana dalam pengimplementasian multikulturalisme.

Relevansi Ide *The Open Society* dan Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah

Pendidikan multikultural merupakan “*an idea or concept, an educational reform movement, and a process*” (Banks, 2014). Lebih Lanjut, Banks (2014) menjelaskan bahwa sebagai sebuah konsep ide, pendidikan multikultural adalah suatu ide yang menekankan bahwa di atas perbedaan gender, orientasi seksual, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaannya masing-masing, setiap individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Kemudian pendidikan multikultural sebagai gerakan perubahan pendidikan maksudnya adalah suatu gerakan yang menyuarakan pembaharuan pendidikan untuk menentang keras segala bentuk diskriminasi dan mengakui bahwa masyarakat dalam berbagai etnis, ras, agama, ekonomi, dan berbagai identitas kultural lainnya adalah sama atau sederajat dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan multikultural juga disebut sebagai sebuah proses, artinya, ia adalah suatu proses untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan, yakni kesederajatan dan kesamaan perlakuan bagi seluruh masyarakat.

Pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam pendidikan sejarah melalui pembelajaran sejarah. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran sejarah memegang peranan penting dalam pembentukan nasionalisme dan persatuan sekaligus merupakan sarana yang efektif dalam menyampaikan perbedaan masa lalu antar wilayah, etnis, maupun budaya di Indonesia serta memaknainya sebagai sebuah keberagaman yang menjadi fondasi kekuatan bangsa. Perbedaan masa lalu atau pengalaman dari berbagai kelompok masyarakat tidak seharusnya disembunyikan dan ditakuti (Supardi, 2014). Oleh karena itu, penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan berbagai cara, di

antaranya yaitu melalui pengembangan model pembelajaran sejarah terintegrasi nilai-nilai multikultural serta pemanfaatan materi sejarah lokal dan materi sejarah kontroversial. Dua cara penerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Nilai-Nilai Multikultural

Pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam model tersebut dapat diterapkan baik melalui metode pembelajaran maupun proses penilaian (Lestariningsih et al., 2018). Terdapat berbagai macam model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan nilai multikultural, utamanya yaitu model-model yang mengakomodasi kegiatan pembelajaran secara berkelompok (*cooperative learning*). Dengan berbagai model yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara berkelompok dalam pembelajaran, mereka diharapkan dapat saling bekerja sama dan mengedepankan sikap toleransi di atas berbagai perbedaan yang ada. Selain itu, mereka juga akan mengerti bahwa kontribusi dari masing-masing individu akan sangat penting dan berarti dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kelompok.

Guru juga dapat menanamkan pendidikan nilai multikultural melalui penerapan metode pembelajaran dengan mengajak siswa untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok heterogen. Dengan demikian, siswa juga akan tertuntut untuk menghargai perbedaan pendapat, memahami bahwa setiap individu mempunyai hak untuk berbicara dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memupuk sikap toleransi satu sama lain (Lestariningsih et al., 2018). Guru juga dapat memberikan penugasan kelompok supaya siswa tertuntut untuk mengenal lebih dekat satu sama lain di luar jam pembelajaran, melatih diri untuk berkomunikasi dengan baik antar sesama, dan yang utama yaitu menerima, menghargai, serta mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi segala jenis perbedaan.

Pembelajaran sejarah pada umumnya menitikberatkan pada pendekatan konstruktivisme yang memungkinkan siswa untuk dapat terbuka pada perbedaan serta memahami diri mereka masing-masing sebagai bagian dari sejarah lokal dan nasional (Supardi, 2014). Dalam proses pembelajaran, siswa akan memahami bahwa suatu pengetahuan terkonstruksi oleh pengalaman serta bias dan nilai, sehingga pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi perspektifnya sendiri (Banks, 2014). Oleh karena itu, nilai-nilai multikultural juga dapat ditanamkan dalam pembelajaran sejarah melalui pendekatan konstruktivistik, sehingga siswa akan dapat memahami bahwa narasi sejarah yang mereka terima dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perspektif penyusunnya. Dengan demikian, siswa akan dapat memahami dan menghargai berbagai perspektif dari tiap-tiap individu yang tidak selamanya selalu sama.

2. Pemanfaatan Materi Sejarah Lokal dan Sejarah Kontroversial

Salah satu implementasi pendidikan nilai multikultural dalam pembelajaran sejarah adalah melalui penyampaian materi sejarah lokal. Sejarah lokal adalah kajian mengenai peristiwa masa lalu yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat, yang umumnya terikat dalam etniskultural pada lingkup geografis tertentu (Priyadi, 2012). Sejarah lokal juga dapat diartikan sebagai kajian mengenai sejarah suatu tempat atau lokalitas yang batasan lokalitasnya ditentukan oleh penulis (Abdullah, 1985). Penyampaian materi sejarah lokal berperan penting dalam upaya menghadirkan peristiwa masa lalu yang dekat dengan siswa karena ia dapat menghadirkan berbagai fenomena seperti sejarah keluarga, sejarah sosial di lingkup lokal, peran pahlawan lokal, kebudayaan lokal, sejarah etnis tertentu, dan berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi di tingkat lokal (Supardi, 2014).

Selama ini, kurikulum pendidikan sejarah yang diberlakukan dalam skala nasional masih terbatas pada standar minimal, sehingga materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran hanya materi sejarah nasional. Sebenarnya, hal tersebut mempunyai maksud yang baik, yaitu untuk kepentingan penguatan nasionalisme bagi siswa di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, materi sejarah nasional cenderung Jawasentris. Hal tersebut dapat dilihat pada tokoh-tokoh yang sering muncul dalam materi sejarah nasional, seperti Pangeran Diponegoro dan Patih Gajah Mada, yang keduanya merupakan tokoh dari Jawa. Tokoh-tokoh tersebut memang mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa, tetapi di sisi lain, bagi siswa yang berada di luar pulau Jawa seperti Papua misalnya, tentu akan merasa asing dengan mereka. Di sini lah kemudian penyampaian materi lokal dirasa sangat perlu untuk dilakukan dalam pembelajaran sejarah.

Narasi sejarah nasional yang memiliki kecenderungan pada wilayah dengan etnis mayoritas tersebut tentu menjadi sebuah kesenjangan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penyampaian materi sejarah lokal dalam hal ini bukan justru bermaksud menegaskan perbedaan dan mendorong disintegrasi, tetapi lebih kepada upaya menghadirkan narasi sejarah secara obyektif (Supardi, 2014). Dengan demikian, guru juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai multikultural, karena dengan memahami bahwa setiap lokalitas tertentu memiliki sejarah atau pengalaman masa lalunya masing-masing, maka siswa akan sadar bahwa sejarah tidak hanya tentang Jawa atau hanya seputar peristiwa besar di lingkup nasional. Siswa-siswa yang berada di luar Pulau Jawa pun akan memiliki kesempatan untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami sejarah-sejarah yang ada di dekat mereka, tidak hanya sejarah nasional yang selama ini seolah jauh dari realitas mereka sendiri.

Penyampaian materi sejarah lokal dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengaitkan narasi sejarah lokal dengan materi-materi yang tertera pada kurikulum. Contohnya, dalam silabus mata pelajaran, terdapat materi tentang Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, kemudian, guru-guru sejarah yang berada di luar Pulau Jawa dapat menyampaikan materi lokal tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah mereka masing-masing saat revolusi tersebut berlangsung. Dengan demikian, pendidikan multikultural melalui pembelajaran dengan materi sejarah lokal akan mengembangkan kesederajatan, menghapus luka-luka di masa lalu, serta mewujudkan tatanan kehidupan yang egaliter (Supardi, 2014).

Selain memanfaatkan materi sejarah lokal, penerapan pendidikan multikultural juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan materi sejarah kontroversial. Materi semacam itu memang masih jarang disampaikan dalam pembelajaran sejarah, tetapi guru dapat sesekali memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran itu sendiri. Kontroversi dalam materi sejarah, menurut Ahmad (2016) salah satunya disebabkan oleh masalah metodologis. Masalah metodologis dalam hal ini meliputi keterbatasan sumber, kecenderungan sumber yang bias. Subjektivisme, yang merupakan kewenangan penulis sejarah dalam memilih dan menafsirkan data, juga menjadi salah satu aspek masalah metodologis. Selain itu, kontroversi dalam materi sejarah juga disebabkan oleh adanya kepentingan sosial politik, dimana sejarah digunakan sebagai sarana legitimasi kepentingan oleh berbagai golongan, baik mayoritas maupun minoritas.

Terdapat beberapa contoh materi sejarah kontroversial di Indonesia yang dipaparkan oleh Ahmad (2016), bahkan di tiap-tiap periode sejarah Indonesia sejak pra-sejarah hingga kontemporer. Contohnya yaitu kontroversi perkembangan dan asal usul manusia, masuk dan berkembangnya pengaruh asing, pengaruh kolonial, dan kontroversi tentang para tokoh. Materi-materi tersebut dapat dimanfaatkan untuk

menantang siswa dalam melatih cara berpikir yang kritis (Septianingsih et al., 2014). Pemikiran yang kritis akan cenderung selalu mempertanyakan sebuah narasi yang ada dan tidak serta merta patuh pada indikasi kendali dalam narasi tersebut. Siswa akan dapat memahami bahwa penulisan narasi sejarah begitu dipengaruhi oleh kepentingan politik dengan tujuan pengendalian, dan sesungguhnya masih ada perspektif lain di luar itu. Dengan demikian, siswa akan dapat berpikir secara terbuka, memahami perbedaan perspektif yang terbentuk karena kepentingan, dan berani menyuarakan bahwa narasi sejarah bukanlah sebuah narasi tunggal.

Pada intinya, gagasan *The Open Society Popper* dapat menjadi landasan dalam penerapan multikulturalisme melalui pembelajaran sejarah. Siswa melalui pembelajaran sejarah diharapkan dapat memahami betul bahwa setiap individu dan pendapatnya harus mendapatkan tempat dan penghargaan yang sama. Tidak ada penguasaan dan pengendalian oleh mayoritas atau kelompok tertentu, karena atas dasar kemanusiaan, kebebasan individu lah yang pertama kali harus diutamakan untuk mewujudkan kesetaraan.

SIMPULAN

Gagasan Popper tentang *The Open Society* yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu berkaitan erat dengan demokrasi, dan dewasa ini, demokrasi telah masuk dalam ranah pendidikan dalam bentuk pendidikan nilai multikultural. *The Open Society Popper* dapat dimanfaatkan sebagai landasan pendidikan multikultural karena memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan individu dan menentang penguasaan oleh kelompok tertentu, dengan tetap hormat pada hukum. Pendidikan multikultural tersebut dapat direalisasikan melalui pendidikan sejarah dengan pengembangan dan penerapan model-model pembelajaran yang mengakomodasi pembelajaran kooperatif, sehingga siswa dapat memahami bahwa kontribusi setiap individu akan sangat berguna bagi kelompok, dan mereka juga akan belajar menghargai perbedaan latar belakang maupun pendapat. Pendidikan multikultural juga dapat direalisasikan melalui pemanfaatan materi sejarah lokal dan sejarah kontroversial, dengan tujuan siswa tidak akan hanya terpaku pada satu narasi terpusat, mampu berpikir kritis dan rasional, serta mengedepankan sikap toleransi karena sadar bahwa setiap individu mempunyai hak dan kebebasan dalam segala bidang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (1985). *Sejarah lokal di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah kontroversial di Indonesia: Perspektif pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Banks, J. A. (2014). *An introduction to multicultural education* (5th ed.). Pearson Education Inc.
<https://doi.org/10.7748/mhp.3.5.37.s20>
- Corvi, R. (2005). *An introduction to the thought of Karl Popper*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203982570>
- Eidlin, F. (2013). On the non-existent theory of the open society and the continuing relevance of Popper's political thought. *SSRN Electronic Journal*, 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2223804>
- Gaus, G. (2017). The open society and its friends: With friends like these, who needs enemies? *The Critique*, 2.
- Gorton, W. A. (n.d.). *Karl Popper: Political philosophy*. <https://iep.utm.edu/popp-pol/>.

- Gorton, W. A. (2006). *Karl Popper and the social sciences*. State University of New York Press.
- Hathaway, F. (2019). *Review: The open society and its enemies, volume 1, by Karl Popper*.
<https://ica.org.uk/review-the-open-society-and-its-enemies-volume-1-by-karl-popper/>
- Jordaan, D. W. (2017). The open society: What does it really mean? *De Jure Law Journal*, 50(2), 396–405.
<https://doi.org/10.17159/2225-7160/2017/v50n2a11>
- Kierstead, J. (2019). Karl Popper's the open society and its enemies, and its enemies. *Journal of New Zealand Studies*, 28, 2–28.
- Lestariningsih, W. A., Jayusman, J., & Purnomo, A. (2018). Penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Rembang tahun pelajaran 2017/2018. *Indonesian Journal of History Education*, 6(2), 123–131.
- Niiniluoto, I. (n.d.). *The open society and its new enemies: Critical reflections on democracy and market economy*.
- Popper, K. R. (1963). *Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge*. Routledge & Kegan Paul.
<https://doi.org/10.2307/2412688>
- Popper, K. R. (1966). *The open society and its enemies* (5th ed.). Routledge.
- Priyadi, S. (2012). *Sejarah lokal: Konsep, metode, dan tantangannya*. Ombak.
- Santosa, Y. B. P. (2017). Problematika dalam pelaksanaan pendidikan sejarah di Sekolah Menengah Atas Kota Depok. *Jurnal Candrasangkala: Pendidikan Sejarah*, 3(1), 30–36.
<https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2885>
- Septianingsih, S., Joebagio, H., & Sariyatun, S. (2014). Model pembelajaran sejarah berbasis isu-isu kontroversial untuk meningkatkan berpikir historis Mahasiswa (studi pada mahasiswa Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto). *Historika: Journal of History Education Research*, 15(2), 98–109.
- Supardi, S. (2014). Pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah lokal. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 91–99. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2621>
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. (2016). *Filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan*. Liberty.
- Yuliantoro, M. N. (2017). *Kritik Popper terhadap problem historisisme*.
<https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/2017/07/28/kritik-popper-terhadap-problem-historisisme/>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.